

## **BAB V**

### **DARI PEMIKIRAN POLITIK KE PEMIKIRAN SOSIAL**

#### **V.1. Pengantar**

Pada bab ini akan memuat analisis secara sosiologis proses mobilitas vertikal Mohammad Natsir, peristiwa Mosi Integral, perdebatannya di Konstituante, dan transformasi perkembangan pemikiran Natsir, hingga kritik terhadap sikap dan pemikiran Natsir pada zamannya.

#### **V.2. Genealogi Intelektual dan Rasionalitas Pemikiran: Dari A. Hassan hingga Agus Salim**

Mohammad Natsir, sering ditulis M. Natsir dan pada papan nama di teras rumahnya, Jalan H.O.S. Tjokroaminoto 46 Jakarta tertulis Mohd. Natsir; dilahirkan pada 17 Juli 1908 di Alahan panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, buah cinta kasih Pasangan suami-istri Idris Sutan Saripado-Khadijah. Idris seorang juru tulis kontrolir, terus mendorong anak laki-laknya itu untuk mendalami Islam. Dorongan Idris kepada anak lelakinya agar giat mempelajari Islam, melahirkan dampak positif. Natsir kecil terdorong juga untuk mengikuti pelajaran di pendidikan formal. Natsir sangat berhasrat untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar *Hollandsche Inlandsche Scholen* (HIS).

Dengan sukacita Natsir mengikuti kakaknya karena dia tahu di Padang ada HIS. Natsir mendaftar ke HIS. Ternyata ditolak. HIS Padang hanya menerima anak pegawai negeri yang bergaji besar, atau saudagar kaya. Karena Idris Sutan Saripado hanya seorang juru tulis, bukan pegawai negeri bergaji besar, bukan pula saudagar kaya raya, maka Natsir tidak bisa masuk HIS. Natsir kecil yang kecewa, mulai bertanya-tanya: “Apakah yang boleh maju dan pintar, hanya anakanak orang kaya?”<sup>232</sup> Pada belasan pertama abad ke-20 itu, beberapa pemimpin pergerakan makin menyadari nasib mereka sebagai bangsa terjajah dan mulai bergerak untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa terjajah dengan mendirikan sekolah-sekolah partikelir. Dengan ikhtiar itu, para pemimpin pergerakan sekaligus menemukan jalan keluar bagi anak-anak bangsa yang tidak dapat diterima bersekolah di HIS milik pemerintah. Di Padang, para pemimpin itu mendirikan HIS Adabiyah. Sebuah sekolah swasta yang waktu belajarnya sore hari. Dari HIS Adabiyah inilah, kehidupan intelektual Natsir dimulai.

Baru beberapa bulan Natsir bersekolah di HIS Adabiyah, tersiar kabar pemerintah membuka HIS di Solok. Pada saat yang hampir bersamaan ayahanda Natsir dipindahtugaskan ke Álahan Panjang, maka Idris dengan bersemangat membawa anak laki-lakinya itu mendaftar ke HIS Solok. Lagi-lagi terdengar lagu lama yang sumbang: “Tidak ada tempat buat seorang anak juru tulis!” Terdengar pula berita: “Hanya tersedia satu tempat di kelas dua.”<sup>233</sup> Dengan penuh keyakinan, Natsir menantang

---

<sup>232</sup> Lukman Hakiem, *Op.Cit.*, hlm 79.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm 80.

supaya dirinya disertakan sebagai calon murid kelas dua. Sesudah melalui berbagai ikhtiar dan perdebatan, akhirnya Natsir dipersilakan mengikuti pelajaran di kelas dua selama beberapa hari, sebagai uji coba. Ternyata Natsir mampu melewati masa uji coba itu dengan mulus. Malah dalam beberapa hal, Natsir mampu melampaui kawan-kawannya satu kelas. Natsir bersyukur, dan dia menyadari prestasinya itu tidak lepas dari bimbingan para guru pejuang di HIS Adabiyah. Tercapai juga cita-cita Natsir belajar di sekolah negeri.

Selain belajar di HIS pada pagi hari, di siang hari Natsir belajar di Madrasah Diniyah. Baik di HIS maupun di Madrasah Diniyah, Natsir belajar dengan bersungguh-sungguh. Selain belajar di HIS dan Madrasah Diniyah, Natsir juga belajar bahasa Arab dan mengaji kitab kuning di malam hari. Melihat Natsir rajin belajar, para guru tertarik.

Almanak menunjukkan tahun 1923 ketika Natsir menyelesaikan masa pendidikannya di HIS Padang dengan nilai baik. Lulus dari HIS, semangat belajar Natsir makin berkobar. Dia ingin melanjutkan pendidikannya ke *Meer Uitgebreide Lagere Onderwijs* (MULO, Pendidikan Rendah Lebih Luas, sekarang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Natsir mendengar kabar bahwa MULO Padang memberikan beasiswa kepada pelajar yang nilai pelajarannya bagus, dan itu harus dibuktikan pada masa percobaan selama tiga sampai enam bulan. Mendengar kabar itu, Natsir yang lulus HIS dengan nilai baik, mencoba peruntungannya. Dia mendaftar ke MULO Padang. Antara harap dan cemas, pada tiga bulan pertama, Natsir belajar bersungguh-sungguh. Bersyukur, ternyata kerja keras Natsir berhasil. Pada kuartal pertama, Natsir

meraih nilai baik untuk seluruh mata pelajaran. Seorang gurunya mengatakan, nilai yang diraih Natsir pada kuartal itu adalah yang terbaik di kelasnya. Dengan nilai seperti itu selain lulus masa percobaan, Natsir mendapat beasiswa 20,00 Gulden setiap bulan. Dengan beasiswa sebesar itu, dapatlah Natsir membantu uang dapur Rabiah kakaknya, juga untuk membeli buku, dan keperluan lain.

Ketika bersekolah di MULO, untuk pertama kalinya Natsir duduk bersama dalam satu kelas dengan murid-murid bangsa Belanda yang lebih segala-galanya dari bangsa pribumi. Memang dalam status kewarganegaraan, orang Belanda adalah warga negara kelas satu dibandingkan kaum pribumi yang diletakkan sebagai warga negara kelas tiga. Warga negara kelas dua adalah orang-orang Timur asing seperti Arab, Cina, India, dan Jepang. Sesudah duduk satu kelas bersama warga negara kelas satu itu, Natsir mendapati kenyataan sesungguhnya warna kulit mereka tidak menjamin bahwa mereka lebih hebat dari kaum pribumi yang berwarna kulit sawo matang. Di antara orang-orang Belanda itu banyak juga yang tinggal kelas, ada juga yang bahasa Belandanya kocar-kacir, tetapi lagaknya luar biasa besar. Mereka menyebut bangsa kita sebagai *vuile Inlanders* (bumi putera yang kotor). Padahal banyak murid berkulit sawo matang yang prestasi belajarnya lebih unggul dari orang-orang Belanda itu.<sup>234</sup>

Di MULO, Natsir menjadi anggota pandu *Natipij* (*Nationale Indoneisische Padvinderij*), organisasi kepanduan *Jong Islamieten Bond* (JIB), organisasi pemuda Islam yang didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Perkumpulan seperti JIB, dan

---

<sup>234</sup> *Ibid.*

*Jong Sumatera* bertambah luas. Betul, perkumpulan-perkumpulan ini bukan partai politik, akan tetapi kehadiran mereka telah menumbuhkan kesadaran akan martabat dan harga diri kaum pribumi menghadapi kecongkakan kaum penjajah, Belanda. Jong Sumatera dan JIB telah berperan besar di dalam mengader generasi muda yang pada masanya kelak tampil menjadi pemimpin bangsa Indonesia.<sup>235</sup> Dari *Jong Sumatera* lahir tokoh-tokoh seperti Bahder Djohan, dan Mohammad Yamin. Dari JIB lahir tokoh-tokoh seperti Sjamsuridjal (Walikota Jakarta tahun 1950-an), Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan tentu saja Natsir sendiri.

Memasuki kelas tiga, dan semakin dekat ke masa ujian akhir, Natsir mulai bertanya-tanya, *what next?* Apa sesudah ini? Melanjutkan sekolah, atau mencari kerja? Di masa itu, seorang lulusan MULO bisa mendapatkan gaji sebesar 90 Gulden. Dengan uang sebesar itu, rasanya Natsir dapat membantu ayah dan ibunya. Akan tetapi, hasrat Natsir untuk melanjutkan pendidikan, juga tidak kurang besarnya. Apalagi, sejak 1919, lulusan MULO diarahkan untuk melanjutkan ke *Algemene Middelbare Schoolen* (AMS, Sekolah Lanjutan Umum) dengan maksud mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Semangat Natsir untuk melanjutkan sekolah ke AMS, juga didorong oleh cita-citanya menjadi seorang sarjana di bidang hukum atau *Meester in de Rechten* (Mr).<sup>236</sup> Apalagi, kedua orangtua Natsir juga turut mendukung keinginan tersebut.

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm 72.

Dengan sikap kedua orangtuanya yang seperti itu, bulatlah tekad Natsir untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Persoalannya, dalam keterbatasan keuangan orangtuanya, dari mana dan bagaimana cara Natsir membiayai sekolahnya kelak? Di tengah pertanyaan seperti itu, Natsir mendapat kabar bahwa murid MULO yang telah mendapat beasiswa, dapat pula memperoleh beasiswa dari AMS di Bandung. Kabar itu tentu saja membahagiakan Natsir, dia mengajukan beasiswa ke AMS Bandung. Semua nilai dari kelas satu sampai nilai hasil ujian akhir dilampirkan, Permohonan Natsir dikabulkan. Natsir diterima di AMS Bandung, dan tiap bulan dia mendapat beasiswa 30 Gulden. Jumlah yang cukup besar di masa itu.<sup>237</sup>

Sebagai orang kebanyakan dengan pendapatan kecil, Idris dan Khadijah sangat bersyukur anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang bergengsi itu. Padahal di masa itu, hanya anak orang kaya dan berpangkat tinggi sajalah yang bisa memasukkan anaknya ke AMS. Idris dan Khadijah bangga, dengan otak cemerlang anak laki-lakinya yang diterima di AMS tanpa harus membayar, malah dibayar.

Pada suatu hari, guru ilmu Bumi-Ekonomi Natsir menawari kepada seluruh murid di kelas untuk membahas secara tertulis “Pengaruh Penanaman Tebu dan Pabrik Gula bagi Rakyat di Pulau Jawa”.<sup>238</sup> Entah karena tertarik kepada tema yang ditawarkan, atau panas oleh sikap politik sang guru kepada kaum pergerakan nasional, Natsir cepat mengacungkan jari, menerima tantangan menulis makalah. Terlihat bibir

---

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> *Ibid.*

guru ilmu Bumi-Ekonomi itu tersenyum sinis waktu mencatat nama Natsir sebagai murid yang akan menulis karangan dalam bahasa Belanda mengenai pengaruh penanaman tebu.

Pada waktu yang telah ditentukan, Natsir membacakan karya tulisnya yang berbahasa Belanda itu di depan kelas, disimak secara saksama oleh guru Ilmu Bumi-Ekonomi yang memberinya tugas. Empat puluh menit lamanya Natsir menyampaikan bukti-bukti yang nyata bahwa tidak benar rakyat di Jawa mendapat keuntungan besar dari beroperasinya pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang diuntungkan oleh pabrik gula itu ialah para pemilik modal dan para bupati yang memaksa rakyat supaya menyewakan tanahnya kepada pabrik gula dengan harga rendah. Sistem pabrik gula itu menyebabkan petani yang miskin tetapi merdeka berubah menjadi buruh pabrik yang terikat kepada upah dan tidak pernah terbebas dari hutang terus menerus.

Selama Natsir membacakan karya tulisnya, suasana kelas hening. Di suatu sudut, guru Ilmu Bumi-Ekonomi terlihat menyimak secara saksama dengan wajah yang kadang-kadang menunjukkan rasa tidak suka. Tempo-tempo dia memperlihatkan mimik heran. Barangkali dia tidak menyangka ada murid kelas 5 AMS yang mengemukakan analisa tajam mengenai pengaruh pabrik gula bagi rakyat di Jawa dalam bahasa Belanda yang fasih. Mungkin dia juga kaget, analisa yang keluar dari murid kelas 5 AMS itu berbeda dari yang dia harapkan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, Natsir merasa berterima kasih kepada guru Ilmu Bumi-Ekonomi yang telah

memberinya tugas membuat makalah itu.<sup>239</sup> Dengan tugas itu, terbukalah mata Natsir terhadap penderitaan rakyat di Jawa Tengah dan Jawa Timur akibat penjajahan Belanda yang kapitalistik. Natsir juga berterima kasih, karena untuk pertama kalinya dia mampu melakukan penyelidikan mengenai masalah yang terjadi di masyarakatnya.

Sesudah menyelesaikan tugas dari guru ilmu Bumi-Ekonomi, Natsir makin tertarik kepada kegiatan politik. Dia makin tertarik menyimak pendapat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Haji Agus Salim, dan Tjipto Mangunkusumo. Setelah mata pelajaran di sekolah tidak lagi menjadi beban berat, makin intenslah Natsir berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dari sini, persinggungan Natsir dengan konteks zaman penjajahan ketika itu, membuat dialog intelektual dan semangat perlawanan dari dalam dirinya meningkat.

Pada masa bersekolah di AMS ini pulalah Natsir berkenalan dengan Ahmad Hassan (1887-1957). Natsir menyapa guru utama Persatuan Islam (Persis, didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an) kelahiran Singapura berdarah Indonesia dan India itu dengan panggilan Tuan A. Hassan. Adalah sahabat karib Natsir, Fachruddin, yang memperkenalkannya kepada Hassan. peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1927. Natsir tertarik kepada kesederhanaan Hassan, kepada kerapihannya, kepada kealimannya, juga kepada ketajamannya ketika bertukar pikiran.

Dalam pandangan Natsir, Hassan adalah seorang alim yang *original*, seorang ulama besar yang berkepribadian tinggi, seorang ahli perusahaan yang praktis, dan

---

<sup>239</sup> *Ibid.*



seorang ahli debat yang tidak canggung menyampaikan pendapatnya. Dengan ketertarikan dan penilaian seperti itu, seringkali Natsir berkunjung ke rumah Hassan yang terletak di belakang gedung pegadaian, Bandung. Di bagian kanan rumah Hassan ada mesin cetak yang dijalankan dengan tangan. Hassan mempunyai usaha percetakan. Untuk mengoperasikan percetakan itu dia dibantu tiga orang karyawan. Dua orang *zetter* (tukang ketik), dan seorang *drukker*. Hassan sendiri yang mengatur *opmaak* (perwajahan, tata letak).<sup>240</sup>

Ketika Natsir berkenalan dengan Hassan, tokoh yang kelak guru sekaligus sahabatnya itu sedang menyusun tafsir Al-Qur'an yang diberi judul *Tafsir Al-Furqan*. Hassan sendiri yang menulis, dia yang mengoreksi, dia mengajari karyawannya bagaimana cara menjilid, dia sendiri pula yang mengatur bagaimana dan ke mana memasarkan kitabnya itu. Natsir sungguh-sungguh tertarik kepada Tuan Hassan. Setiap ada waktu senggang, Natsir berkunjung ke rumah Hassan. Kadang-kadang bersama Fachruddin, sering pula sendirian. Setiap Natsir berkunjung, selalu didapatnya Hassan sedang bekerja. Entah sedang di tempat *zetterij* percetakan, entah sedang mengoreksi naskah yang sudah *dizet*, entah sedang membaca buku, entah pula sedang menulis *Tafsir Al-Furqan*.<sup>241</sup>

Setiap kali Natsir datang, Hassan selalu menghentikan pekerjaannya untuk melayani anak muda itu bercakap-cakap, bertukar pikiran. Oleh sikap Hassan seperti

---

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm 74.

<sup>241</sup> *Ibid.*

itu, Natsir merasa tidak enak. Dia merasa telah mengganggu Hassan bekerja. Oleh karena itu, Natsir balik badan, hendak meninggalkan kediaman Hassan. Akan tetapi, Tuan Hassan rupanya melihat kedatangan Natsir. Diapun memanggil anak muda itu, “Natsir, jangan pergi. Duduklah!” Natsir menjawab panggilan Hassan. “Tuan, teruslah bekerja. Tidak perlu menghentikan pekerjaan. Saya datang tidak untuk keperluan khusus,” kata Natsir.<sup>242</sup> Akan tetapi, Hassan tidak menghentikan kebiasaannya itu. Setiap kali Natsir datang, Hassan selalu menghentikan pekerjaannya dan melayani Natsir bertukar pikiran. Bagi Hassan, bertukar pikiran dengan Natsir rupanya dianggap lebih penting dari semua pekerjaannya.

Begitulah, setiap kali Natsir datang, Hassan melayani anak muda itu bertukar pikiran mengenai masalah-masalah Islam, soal-soal politik, dan hal ihwal kemasyarakatan. Semua percakapan itu membekas di hati dan pikiran Natsir, apalagi Hassan menghadiahi Natsir satu tafsir Quran berbahasa Inggris karya Mohammad Ali. Perkenalan dengan Tuan A. Hassan, mendorong Natsir untuk mendalami kembali pelajaran agama Islam yang sudah dimulainya sekian tahun yang lalu di Solok dan yang kini terbengkalai. Dari hari ke hari Natsir makin tertarik mempelajari kembali ajaran Islam. Pertemuan dengan Hassan inilah yang membuka keran mobilitas vertikal bagi Natsir. Melalui Hassan, Natsir banyak bertukar ide dan gagasan mengenai Islam dan kebangsaan. Dari sini pulalah, Natsir mampu mengembangkan pemikirannya di bidang kepenulisan dan pendidikan.

---

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm 75.

Selain giat menimba ilmu kepada Tuan Hassan dan mengajar, Natsir juga aktif di JIB cabang Bandung. Di JIB, Natsir mulai memberi ceramah agama Islam, dan berdebat. Di masa inilah Natsir bertemu dengan Kasman Singodimedjo (1904-1982), Mohamad Roem (1908-1983), Prawoto Mangkusasmito (1910-1970), dan lain-lain. Di masa ini pula Natsir berkenalan dengan Putti Nurnahar (1905-1991) aktivis JIB *Dames Afdeling* (JIBDA, JIB Bagian Putri) yang kelak menjadi istrinya.

Meskipun A. Hassan telah memberi pengaruh besar terhadap jalan hidupnya, namun Natsir mengaku ada tiga orang yang mempengaruhi alam pikirannya. Ketiga tokoh itu ialah Tuan A. Hassan, Haji Agus Salim, dan Syaikh Ahmad Soorkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Tuan Hassan diakui Natsir sebagai gurunya di bidang keagamaan. Natsir tertarik kepada cara Hassan menginterpretasikan Islam dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ia memberantas khurafat, kekolotan, dan kebekuan. “Semakin saya ikut ceramah-ceramahnya, semakin bersimpati saya kepadanya,” kenang Natsir sambil menambahkan, “Tuan Hassan selalu menanamkan kebiasaan percaya diri dan jangan takut salah. Jika nanti ternyata salah, perbaiki lagi. Ia selalu memberi tamsil ‘anak itu kalau digendong terus tak akan pandai berjalan’”.

Dalam bidang politik, Natsir banyak diilhami oleh pemikiran Haji Agus Salim. Bersama Natsir, yang juga banyak menimba ilmu dari Haji Agus Salim adalah Mohamad Roem, Jusuf Wibisono (1909-1982), Kasman Singodimedjo, dan Prawoto Mangkusasmito. Agus Salim juga mendidik generasi muda sama seperti yang

dilakukan oleh Tuan Hassan. Jika Natsir datang membawa permasalahan kepada Salim, tokoh itu lalu memberi tahu cara menganalisisnya, tetapi Natsir sendiri yang harus mengambil keputusan. “Para sesepuh (yang benar),” kata Natsir, “biasanya selalu ingin melihat kita memecahkan persoalan sendiri. Setelah benar-benar mengalami kesulitan yang tidak dapat kami pecahkan, barulah ditunjukkan bagaimana memecahkan kesulitan yang dihadapi, itupun dengan cara yang tidak langsung. Dan dengan cara itu tumbuh keberanian dan kedewasaan yang pada akhirnya lahir corak kepemimpinan baru.”<sup>243</sup>

Dari Syaikh Ahmad Soorkati, Natsir banyak belajar mengenai pemikiran Rasyid Ridha. Mengenai Syaikh Soorkati, Natsir punya pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Suatu hari, dia datang ke rumah Soorkati di Jakarta. Saat itu di rumah Soorkati sedang ada pengajian. Begitu Natsir masuk, Soorkati memperkenalkan tamunya itu kepada jamaah pengajian, teman-teman Al-Irsyad, “Saudara sekalian. Saudara Natsir tinggal di Bandung. Ia punya kegiatan pendidikan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan.” Dingin kuduk Natsir mendengar cara Soorkati memperkenalkan dirinya. Dia merasa, Soorkati terlampau berlebihan. “Tapi begitulah antara lain cara Syaikh Soorkati,” kenang Natsir.<sup>244</sup>

Dari pertemuannya dengan ketiga tokoh di atas, Natsir memberi catatan penting terhadap cara mereka membimbing generasi muda. Hassan, Salim, dan Soorkati tidak

---

<sup>243</sup> AW. Pratiknya, dkk., *Op.Cit.*, hlm 26-30.

<sup>244</sup> *Ibid.*

pernah mendiktekan kehendaknya. Natsir dan kawan-kawan diperlakukan sebagai pribadi. Ketiga tokoh itu beranggapan bahwa yang muda itu bisa tumbuh, dan mereka berperan sebagai pembimbing. “Sehingga hubungan kami tidak kaku,” kata Natsir. Melalui orang-orang itulah, wawasan keislaman dan kebangsaan Natsir semakin berkembang.<sup>245</sup>

Selain ketiga tokoh tersebut, ada satu tokoh lagi yang memberi kesan mendalam kepada Natsir. Tokoh itu ialah Haji Oemar Said Tjokroaminoto (1882-1934). Untuk pertama kalinya Natsir bertemu dengan tokoh utama Sarekat Islam itu di stasiun kereta api Bandung. Lelaki dengan kumis tebalnya yang khas itu sedang melakukan kegiatan turun ke bawah (*turba*), dan dijadwalkan akan mengunjungi cabang-cabang SI di daerah Bandung dan sekitarnya. Sebagai aktivis SI, Natsir turut menjemput kedatangan Tjokroaminoto.<sup>246</sup>

Begitu bertemu, sudut mata Natsir segera menangkap pemandangan tidak biasa. Pemimpin karismatik yang dijuluki “Raja Jawa tanpa Mahkota” itu, turun dari kereta api sambil menenteng *veldbed* (tempat tidur yang bisa dilipat). Penasaran dengan pemandangan yang tidak biasa itu, sesudah berkenalan, Natsir langsung menyergap Tjokroaminoto dengan pertanyaan, “Mengapa Tuan membawa *veldbed*?” Orator ulung dan guru dari banyak aktivis pergerakan kemerdekaan itu tersenyum lebar. Sambil menatap wajah Natsir, Tjokroaminoto berkata: “Saya tidak mau menjadi beban orang

---

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.*

yang saya datangi. Dengan *veldbed* ini saya bisa menginap di mana pun. Di masjid, atau di mana pun.”<sup>247</sup>

### V.3. Perdebatan Intelektual, Revolusi Nasional dan Arsitek Negara Kesatuan

Pada fase ini, pengetahuan Natsir dalam hal keislaman semakin berkembang. Ia mulai berani mengemukakan gagasan-gagasannya. Berada dekat dengan A. Hassan dan Persis ternyata berpengaruh besar pada dirinya. Siang hari, Natsir bekerja bersama A.Hassan menerbitkan Majalah *Pembela Islam*. Malam hari, menelaah Al-Qur'an, membaca kitab-kitab berbahasa Arab, termasuk Majalah *Al-Manar*, dan buku-buku berbahasa Inggris. Dari *Pembela Islam*, Natsir mendapat honor 20,00 Gulden/bulan. Cukup untuk sewa rumah, uang makan, dan sedikit uang saku.

Sebagai redaktur *Pembela Islam*, dari hari ke hari Natsir berhadapan dengan soal-soal politik dan masalah-masalah keislaman. Kelak *Pembela Islam* dikenal sebagai media massa yang responsif terhadap mereka yang menyalahpahami ajaran Islam atau mencela Islam. Ketika seorang perempuan bernama Soewarni (kemudian menjadi istri Mr. A. Karim Pringgodigdo) mengejek poligami, *Pembela Islam* langsung menyahuti ejekan itu. Demikian juga ketika dr. Soetomo di Surabaya mengatakan “pergi ke Digul lebih baik daripada pergi ke Makkah”, *Pembela Islam* tampil ke depan menjawab Soetomo.<sup>248</sup>

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Lukman Hakiem, *Op.Cit.*, hlm 88.

Dalam waktu singkat, *Pembela Islam* sangat populer. Pelanggannya tersebar di seluruh Indonesia. Di mana-mana orang membicarakan *Pembela Islam*. Ada yang pro, tentu saja ada yang kontra. Oleh pihak yang kontra, *Pembela Islam* dianggap sebagai media pemecah belah persatuan. Semua makian dan tuduhan itu tidak dipedulikan. *Pembela Islam* jalan terus. Menjadi pendirian *Pembela Islam* untuk memisahkan barang yang benar dari barang yang tidak benar.

Selain merespon Soewarni dan Soetomo, *Pembela Islam* juga pernah berhadapan dengan Ir. Sukarno (1901-1970), pendiri dan Pemimpin Besar Partai Nasional Indonesia (PNI). Awalnya, Natsir dan kawan-kawan termasuk yang tertarik kepada pidato Bung Karno. Meskipun Natsir sudah paham isi pidato Sukarno, tetapi cara tokoh pergerakan itu menyampaikan pidato tetap memikat hatinya. Akan tetapi lambat laun Natsir dan kawan-kawan yang tergabung dalam JIB merasakan ada perbedaan yang tajam dengan Sukarno. Bung Karno tidak mau membawa agama di dalam perjuangannya. Cukup nasionalisme saja. Karena, kata Sukarno dan kawan-kawan, kalau agama dibawa-bawa akan menceraiberaikan perjuangan.

Berbeda dengan Sukarno, Natsir dan kawan-kawan berpendapat, dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, dorongan agama Islam justru lebih kuat. Selain perbedaan itu, dalam kampanye PNI dan dalam pidato-pidatonya, Sukarno sering terdengar mengejek ajaran Islam. Kejadian-kejadian itu dibicarakan oleh Natsir bersama Fachruddin dan A. Hassan dalam rapat redaksi *Pembela Islam*. Maka, pada nomor-nomor berikutnya, *Pembela Islam* menurunkan tulisan yang menjawab opini

Bung Karno mengenai Islam. Cara Pembela Islam mengupas persoalan terkenal tajam dan pedas. Natsir sendiri lebih banyak menulis analisa. Natsir berpendapat, gerakan kebangsaan yang dikembangkan oleh Bung Karno pada saat itu, mengandung bibit-bibit perpecahan dan kebencian kepada Islam. Sukarno terkesan memandang enteng kepada Islam. Dari sinilah, benturan intelektual antara Natsir dan Sukarno meningkat. Dari tulisan berbalas tulisan. Tuduhan berbalas sanggahan. Keduanya terlihat sangat kukuh dalam mempertahankan argumennya masing-masing. Pada fase inilah, tulisan-tulisan Natsir mengenai Islam dan kebangsaan banyak muncul.

Meskipun perbedaan pendapat antara Natsir dan kawan-kawan dengan Sukarno dan para pengikutnya relatif tajam, tetapi tidak pernah terjadi bentrok fisik di antara dua kelompok ini. Dalam hal perbedaan ide, memang akhirnya antara Natsir dan Sukarno ada garis pemisah, tetapi hubungan pribadi mereka tetap dekat. Ketika Sukarno ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin, adalah kelompok *Pembela Islam* -orang-orang yang dalam hal gagasan tidak sepaham dengan Bung Karno- yang pertama kali menjenguk Sukarno. “Bukan orang PNI,” kata Natsir seperti dikutip Editor No. 22/ Tahun VI//20 Februari 1993. Ketika Sukarno diadili oleh pemerintah kolonial Belanda di muka *Landraad* Bandung, Pembela Islam tampil dengan serangkaian tulisan membela Sukarno. Salah satu dari rangkaian tulisan pembelaan terhadap Sukarno ialah tulisan Haji Agus Salim yang antang dan tajam berjudul “Hakim, Hukum, dan Keadilan.”<sup>249</sup>

---

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm 90.



Namun, hubungan Natsir dan Sukarno menjadi sangat akrab ketika di awal kemerdekaan. Keduanya sadar, bahwa kepentingan negara harus berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. *“Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka itu lagi.”*, ujar Sukarno. *“Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula? Nanti saja.”*, jawab Natsir. Percakapan mesra di antara dua petinggi negeri itu terjadi pada 1946, ketika ibukota Republik berada di Yogyakarta. Sukarno menjadi presiden sedangkan Mohammad Natsir menjabat Menteri Penerangan pada kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir.<sup>250</sup>

Pada 1930-an kedua orang itu pernah terlibat polemik tajam di surat kabar. Sukarno menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan akibat-akibat negatifnya. Tulisan-tulisan Natsir jernih dan argumentatif. Tatkala Indonesia merdeka, keduanya berjumpa lagi. Kali ini bukan di medan gagasan yang abstrak, melainkan di ranah perjuangan yang konkret melawan Belanda. Sukarno menjadi proklamator dan presiden sedangkan Natsir tiga kali menjadi Menteri Penerangan dalam tiga kabinet Sutan Sjahrir berturut-turut pada 3 Januari 1946 sampai 27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29 Januari 1948 hingga Desember 1948.

---

<sup>250</sup> Seri Buku Tempo, 2017, *Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim*, (Jakarta: KPG), hlm 38.

Sejak awal, ketika Sjahrir mengusulkan Natsir menjadi Menteri Penerangan, Presiden Sukarno tidak keberatan. Justru ia menyambut dengan mengatakan, “*Hij is de man* (bahasa Belanda, artinya dialah orangnya).” Barangkali Sukarno teringat akan pengalamannya ketika berpolemik dan mengakui kepiawaian Natsir dalam menyusun kata-kata. Di Istana Yogyakarta, Presiden Sukarno kerap mengundang teman dan pejabat Republik untuk sarapan bersama. Natsir termasuk orang yang sering menerima undangan itu. Hubungan keduanya amat dekat dan hangat. Bisa dibilang, tak ada pidato Presiden pada 17 Agustus yang dibuat tanpa melalui persetujuan Natsir, Menteri Penerangan saat itu.<sup>251</sup>

Puncak kemesraan hubungan Sukarno dan Natsir terlihat pada saat pengajuan mosi kembali ke negara kesatuan oleh Natsir di parlemen Republik Indonesia Serikat. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan kemudian bergabung lagi dalam Republik Indonesia. Menghadapi terpecahnya negara ke dalam berbagai negara bagian, Natsir segera bermanuver. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain. Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain, Natsir mengajukan gagasan kompromistis. Dia menyarankan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya.

---

<sup>251</sup> *Ibid.*, hlm 39.

Usul itu diterima pemimpin fraksi lain. Maka pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. Pidato itu ditutup dengan mosi yang intinya: “Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.” Mosi itu diteken beramai-ramai oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sakirman, K. Werdoyo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr Cokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H Sirajudin Abbas. Mereka mewakili 11 fraksi di parlemen.<sup>252</sup>

Untuk membentuk negara kesatuan itu, dibuat Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Dalam panitia itu, Mr Sjafroeddin Prawiranegara dari Masyumi yang masih menginginkan sistem parlementer. Keputusan itu tak cuma mengecewakan Masyumi, tapi juga Sukarno, yang kewenangannya sebagai presiden di sistem pemerintahan parlementer amat terbatas. Maka, ketika mosi kembali ke negara kesatuan berhasil memenangi suara mayoritas di parlemen, Sukarno tak ragu menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang akan memimpin kabinet. “Natsir dari Masyumi karena mereka mempunyai konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.”<sup>253</sup>

---

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm 56.

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm 43-44.

Pada 15 Agustus 1950, Presiden Sukarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia Serikat. Dua hari kemudian, saat perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Sukarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momen bersejarah itu dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia. Dan Mohammad Natsir patut dicatat sebagai sang arsitek utama.<sup>254</sup> Dalam konteks ini, Natsir muncul ke permukaan sebagai seorang intelektual Islam dan secara bersamaan tampil sebagai aktor terpenting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Mobilitas vertikal ini jugalah yang akhirnya mengantarkan Natsir berada di puncak karirnya sebagai intelektual, yaitu menjadi perdana menteri pertama NKRI.

#### **V.4. Distribusi Gagasan Intelektual dan Tantangannya: Masyumi,**

##### **Konstituante dan Perjuangan Mempertahankan Demokrasi**

Sekembali dari Yogyakarta pasca berdiskusi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Natsir mempersiapkan diri untuk lebih fokus mengemban amanah sebagai ketua Partai Masyumi. Tidak terbersit dalam pikirannya untuk kembali menjadi pejabat pemerintah. Jika selama periode 1945-1950 Natsir terus berada di dalam pusaran kekuasaan, itu lebih karena panggilan perjuangan. Sekarang, Natsir merasa sudah tiba saatnya untuk berjuang di lapangan lain, yaitu mengurus dan

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

membesarkan Partai Masyumi sebagai alat perjuangan. Menurut Natsir, mengurus dan membesarkan Masyumi tidak kurang mulianya dibanding menjadi pejabat pemerintah.

Paling sedikit ada dua alasan mengapa Natsir berpikir untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada Masyumi. *Pertama*, salah satu keputusan Mukhtar Masyumi tahun 1949 ialah melarang Ketua Partai menjadi menteri. Apabila menjadi menteri pun dilarang, apalagi menjadi perdana menteri. Dan, larangan itu tentu saja berlaku juga untuk Natsir yang sejak Mukhtar 1949 diberi amanah menjadi Ketua Masyumi. *Kedua*, sejak merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di dalam Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, Partai Masyumi yang diwakili oleh Sjafruddin Prawiranegara bersikukuh agar Negara Kesatuan dikelola dengan sistem pemerintahan presidensial.<sup>255</sup> Usul Masyumi ditolak oleh koalisi PNI dan PSI. Bahkan usul jalan tengah agar bila sewaktu-waktu ada keadaan darurat, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta diberi kewenangan memimpin pemerintahan, juga ditolak. Sebagai partai yang menganjurkan dan menyokong sistem kabinet presidensial, Natsir berpendapat tidak tepat Masyumi berada dalam pemerintahan yang dikelola dengan sistem kabinet parlementer.

Beberapa hari kemudian, Presiden Sukarno mengundang Natsir ke Istana. Pada tanggal 22 Agustus 1950 itulah Sukarno menunjuk Natsir menjadi formatur kabinet. Setelah berdiskusi dengan petinggi Masyumi, akhirnya Natsir menyetujui hal tersebut. Dalam melaksanakan tugas dari Presiden, Natsir dibantu oleh koleganya; Sjafruddin

---

<sup>255</sup> *Ibid.*, hlm 87.

Prawiranegara, dan K.H.A. Wahid Hasjim.<sup>256</sup> Ketiga pemimpin Masyumi itu sepakat bahwa kabinet yang akan mengisi kabinet harus mendapat dukungan luas dari sebanyak mungkin partai dan mungkin suara di parlemen, agar sifat kesatuan nasional dari kabinet yang akan disusun benar-benar tercermin.

Tugas Kabinet Natsir tidak ringan. Kabinet di negara yang baru saja selesai mengerahkan segala daya dan upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran di medan perang dan diplomasi di meja perundingan, harus mampu mengubah situasi revolusioner ke keadaan normal, dan meletakkan dasar-dasar demokrasi politik yang sehat. Salah satu masalah serius yang dihadapi Negara Kesatuan ialah banyaknya senjata di tangan para sukarelawan dari berbagai ideologi. Di masa perang kemerdekaan yang menghajatkan keikutsertaan seluruh anak bangsa, keberadaan senjata di tangan para pejuang dari berbagai ideologi itu legal dan sama sekali tidak jadi masalah. Sesudah perang selesai, dan negara mulai menata organisasi militer, keberadaan senjata itu menjadi ilegal, dan harus ditertibkan. Yang dikuatirkan antara lain, jika terjadi silang sengketa di antara para bekas pejuang yang berbeda ideologi itu, senjata cepat menyalak. Namun, dengan kelihaiannya Natsir mampu mengatasi hal ini.

Hal serupa juga terjadi dalam rangka menyelesaikan Darul Islam (DI) secara damai. Bersama dengan sahabat karibnya, HAMKA, Natsir menjelaskan rencananya kepada HAMKA berkenaan dengan keamanan, terutama tentang DI Kartosoewirjo.

---

<sup>256</sup> *Ibid.*

Natsir sangat berkehendak agar Kartosoewirjo bergabung kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Natsir dan HAMKA akhirnya bersepakat, untuk membicarakan rencana itu dalam forum yang lebih luas. “Fikiran dan pendapat pemuka-pemuka Islam harus dipersatukan,” kata HAMKA. Beberapa hari sesudah diskusi tersebut, diselenggarakanlah pertemuan para pemuka Islam di rumah K.H.A. Wahid Hasjim di Jakarta. Selain Natsir, hadir dalam pertemuan itu K.H.A. Wahab Hasbullah, A. Hassan, dan HAMKA. Diskusi memutuskan supaya K.H. Muslich (tokoh NU) mencari kontak dengan Kartosoewirjo, dan menemui di markasnya di Jawa Barat.<sup>257</sup>

Pada akhir bulan Desember 1950 Perdana Menteri Natsir memberi tugas kepada Kiai Muslich (1910-1998) untuk menyampaikan “Amanat Pemerintah Republik Indonesia kepada Tuan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo”. Kiai Muslich sebagai pengembal amanat, diketahui berteman akrab dengan Kartosuwirjo ketika masih sama-sama aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Tugas itu dilaksanakan dengan baik Oleh Kiai Muslich. Seorang diri, dia dibawa ke markas Kartosoewirjo. Ketika bertemu, layaknya dua sahabat karib yang lama tidak bertemu, keduanya saling mengucapkan salam, saling memeluk, dan saling berbagi cerita nostalgia. Sesudah itu, secara terbuka Kiai Muslich menyampaikan maksud kedatangannya kepada Kartosoewirjo, yaitu menyampaikan Amanat Pemerintah RI agar Kartosoewirjo kembali ke pangkuan Indonesia, menghentikan permusuhan bersenjata melawan pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm 90.

Merasa pesannya sudah sampai dan mendapat respon positif, Kiai Muslich, pamit. Kartosoewirjo memerintahkan orang kepercayaan untuk mengawal Kiai Muslich sampai di tempat yang benar-benar aman. Akan tetapi, ketika rombongan kecil itu sedang menuruni lereng, tiba-tiba terdengar rentetan suara tembakan diarahkan ke rombongan Kiai Muslich. Rupanya ada sepasukan tentara yang sedang memburu Kartosoewirjo. Melihat ada rombongan kecil dengan pengawal bersenjata, tanpa bertanya lebih dulu, pasukan militer itu langsung menembaki rombongan Kiai Muslich.

Tokoh NU yang terkenal sederhana itu selamat, namun orang kepercayaan Kartosoewirjo tewas di tempat kejadian. Kiai Muslich sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Akibat serangan tidak terduga itu, ikhtiar Kiai Muslich membujuk Kartosoewirjo yang sudah menunjukkan tanda-tanda positif, gagal. Sejak itu, Kartosoewirjo tidak mau berunding dengan siapapun. Begitulah peranan Natsir yang tidak berhasil dalam menyelesaikan Darul Islam Kartosoewirjo. Sesudah kegagalan itu, hubungan Natsir dengan Kartosoewirjo masih terus berjalan dengan baik. Belakangan sesudah Kabinet Natsir (1950-1951) jatuh, Dr. Soekiman Wirjosandjojo menggantikan Natsir memimpin kabinet (1951-1952). Saat itulah Kartosoewirjo mengatakan, “Dari sekarang, tidak ada hubungan lagi dengan RI”.<sup>258</sup>

Pada tahun 1955, pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di bawah Kabinet Boerhanoeddin Harahap dengan undang-undang ultrademokratis, diikuti oleh 118 peserta untuk DPR, dan 91 kontestan untuk Konstituante. Peserta sebanyak itu terdiri

---

<sup>258</sup> *Ibid.*, hlm 91.



dari partai politik, golongan, gabungan perorangan, dan calon perorangan sipil maupun militer. Menghadapi pemilihan umum 1955, Partai Masyumi bukan lagi satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam seperti diikrarkan pada saat berdirinya. Menjelang pemilihan umum 1955, selain Masyumi ada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (partai NU), Partai Islam Perti, Partai Persatuan Tarikat Indonesia (PPTI), dan Angkatan Kesatuan Umat Islam (AKUI). Dalam rangka persaingan merebut suara, sering kali terjadi benturan di antara sesama partai politik Islam. Ironisnya, benturan itu terjadi justru di luar soal-soal program atau pendapat partai masing-masing dalam politik. Yang paling terlihat, tentu saja masalah perbedaan madzhab.

Menanggapi hal ini, tokoh utama Partai NU, K.H.A. Wahid Hasjim menegaskan pendiriannya bahwa yang penting bagi umat Islam dalam pemilihan umum bukanlah kemenangan partai-partai Islam, namun kemenangan prinsip-prinsip Islam. Menurut putra hadratus syaikh ini, bagi umat Islam harus menjadi jelas lebih dulu bahwa yang paling penting bukanlah kemenangan Nahdlatul Ulama, atau kemenangan Masyumi, atau Partai Syarikat Islam Indonesia, atau Muhammadiyah, dan sebagainya lagi. Akan tetapi Yang penting bagi umat Islam, ialah kemenangan bagi prinsip-prinsip keislaman dan terpilihnya orang-orang ingin menjalankan syariat Islam, “tidak peduli apakah yang mereka itu orang NU, Masyumi, PSII, Muhammadiyah, atau lainnya,” ujar salah seorang penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu.

Pemilu pertama pada tahun 1955 tersebut akhirnya melahirkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, PKI dan NU. Sedangkan partai-partai lainnya hanya mendapat satu hingga dua kursi saja. Dengan perolehan suara seperti di atas, Masyumi bersiap diri melaksanakan perintah pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, memasuki gelanggang pertarungan gagasan di Konstituante untuk “bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Menurut Adnan Buyung Nasution, Konstituante dan perdebatan di dalamnya inilah yang menjadi titik kulminasi bersejarah dari perjuangan untuk meletakkan dasar pemerintahan konstitusional sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Perjuangan untuk menciptakan pemerintahan konstitusional ini merupakan salah satu dari kehendak untuk memperoleh kemerdekaan sejak zaman kolonial. “Sisi lain dari kehendak untuk memperoleh kemerdekaan ialah aspirasi untuk memerdekakan diri dari kekuasaan asing, kebebasan nasional untuk menentukan diri sendiri (*self-determination*).”<sup>259</sup>

Tokoh-tokoh umat Islam yang terpilih pada pemilu tahun 1955 banyak yang duduk menjadi anggota Konstituante. Partai Masyumi berhasil mendudukkan 112 anggotanya di Konstituante. Selain Mohammad Natsir, juga terdapat nama-nama terkenal lainnya seperti Buya Hamka, Kasman Singodimedjo, KH Isa Anshari, Zainal Abidin Ahmad, Osman Raliby, K.H Faqih Usman, Prof. Kahar Muzakir, A.R

---

<sup>259</sup> *Ibid.*

Baswedan, Bey Arifin, Umar Hubeis, Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, KH. Rusyad Nurdin, A.R. Sutan Mansur, M. Hasbie Ash-Shiddiqie, H.M Basyuni Imran, dan lain-lain, duduk sebagai anggota Fraksi Masyumi di Konstituante. Sebelumnya dalam kampanye tahun 1955, mereka bersama para tokoh dari partai Islam lainnya membentuk “Front Islam” yang mengajukan gagasan Islam sebagai dasar negara.<sup>260</sup>

Sesuai dengan fungsinya, Konstituante yang diresmikan pada 10 November 1956, menampung tiga usul dasar negara, yaitu: Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Front Islam, dengan 230 anggotanya yang terdiri dari beberapa partai Islam, berjuang sekuat tenaga, mengajukan gagasan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Bertarung dengan 273 anggota Konstituante yang mendukung Pancasila. Perdebatan berlangsung sengit. Seperti parade pidato, masing-masing anggota partai tampil memaparkan gagasan-gagasannya soal dasar negara. Inilah suasana yang disebut oleh Mohammad Natsir sebagai “konfrontasi dalam suasana toleransi.” Sidang yang dipimpin oleh tokoh PNI, Soewirjo ini menjadi persidangan terpanjang dalam sejarah parlemen di Indonesia, yaitu berlangsung dari tahun 1956 sampai 1959.<sup>261</sup>

Salah satu tokoh Masyumi, Kasman Singodimedjo mengatakan dalam kesempatannya, “Saudara ketua, saya masih ingat, bagaimana almarhum Ki Bagus Hadikusumo Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu

---

<sup>260</sup> Artawijaya, *Op.Cit.*, hlm 85.

<sup>261</sup> *Ibid.*

sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam) untuk dimasukkan dalam mukaddimah dan Undang-undang Dasar 1945. Begitu ngotot saudara ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta menyuruh Mr T.M Hassan sebagai putera Aceh menyantuni Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa enam bulan lagi sesudah Agustus 1945 kita akan bentuk sebuah Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo untuk menanti,” kenang Kasman.<sup>262</sup>

Ia melanjutkan, “Kini juru bicara Islam Ki Bagus Hadikusumo itu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena telah berpulang ke *rakhmatullah*. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti enam bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai dengan wafatnya...”<sup>263</sup>

Kasman terus berpidato mengingatkan janji Soekarno. Janji tentang kesempatan bagi umat Islam untuk bisa membuat Undang-undang yang sesuai dengan aspirasi Islam. Kasman mengingatkan, “Janganlah kami golongan Islam di Dewan Konstituante sekarang ini *difait-a complikan* (diadu domba) lagi dengan anggapan-anggapan semacam; Undang-undang Dasar Sementara dan Dasar Negara tidak boleh dirubah, tidak boleli diganti, tidak boleh diganggu gugat! Sebab *fait-a compli* (adu domba) semacam itu sekali ini, saudara ketua, hanya akan memaksa dada meledak!”<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm 86.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

Tokoh Partai Masyumi lainnya, seperti Abdul Kahar Muzakkir juga menuntut janji serupa. Ia mengatakan, “Kalau Umat Islam pada tahun 1945 terpaksa menerima Undang-Undang Dasar 1945, itu oleh karena Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945 (saat penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, pen) telah menjanjikan kepada wakil-wakil umat Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan bahwa dikemudian hari secepat mungkin mereka akan dapat menyempurnakan Undang-Undang Dasar sesuai cita-cita umat Islam. Janji beliau itu dipegang teguh dan ditagih kini oleh umat Islam,” tegasnya.<sup>265</sup>

Selain Kasman dan Kahar Muzakkir, Buya Hamka yang juga anggota Partai Masyumi mengatakan bahwa Pancasila dikenal oleh beberapa orang saja, sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia menganut dasar yang asli, yaitu Islam. “Islam adalah dasar yang asli di tanah air kita.. dan pribadi sejati bangsa Indonesia,” tegasnya. Malah, kata Hamka. “Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia.” Hamka juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan bagi semangat proklamasi. Hamka menjelaskan bahwa sejak abad 19 perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan adalah dilatarbelakangi oleh perjuangan untuk menegakkan suatu negara berdasarkan Islam. Perang yang digelorkan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin, dan lain-lain untuk mengusir kolonial Belanda, kata Hamka, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Islam. “Kamilah yang meneruskan wasiat mereka,” tegas Hamka sambil

---

<sup>265</sup> *Ibid.*, hlm 87.

menyebut orang yang mengkhianati ruh nenek moyang pemimpin terdahulu adalah orang yang menukar perjuangan mereka (para pahlawan, pen) dengan Pancasila.<sup>266</sup>

Suara Natsir di Konstituante yang cukup nyaring terjadi pada 13 November 1957, selaku Ketua Fraksi Masyumi di Konstituante, Natsir menyampaikan pidatonya yang kemudian diberi judul: *“Islam sebagai Dasar Negara.”* Pada permulaan pidatonya, Natsir mengingatkan bahwa tugas Konstituante menyusun konstitusi yang definitif untuk menggantikan konstitusi sementara, hanya dapat dipenuhi apabila Majelis ini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjelajah, membahas, membanding pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia, agar hasil yang dicapai nanti benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan generasi yang akan datang.

Menurut Natsir, syarat mutlak bagi keberhasilan penjelajahan pemikiran itu ialah jika semua anggota Konstituante membuka telinga dan hati terhadap setiap pendirian yang dikemukakan, dan membahasnya dengan sungguh-sungguh. Natsir menyatakan persetujuannya agar dalam mengemban amanat Konstitusi ini, semua anggota Konstituante bersikap toleran. Jika dalam membahas struktur negara, dasar negara, dan lain-lain, muncul alternatif federasi di samping kesatuan, atau alternatif Islam, dan Sosial-Ekonomi, di samping Pancasila; itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu menimbulkan kegusaran dari pihak manapun. Tidaklah pada tempatnya bila orang tergopoh-gopoh mempergunakan kualifikasi-kualifikasi seperti tidak setia

---

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm 89.

kepada Proklamasi atau mengkhianati negara atau semacam intimidasi terselubung jika di ruang ini dikemukakan alternatif-alternatif untuk konstitusi. “Orientasi, membahas, lalu membandingkan alternatif-alternatif, dan akhirnya menentukan keputusan, itu adalah tugas kita di Konstituante ini,” ujar Natsir.<sup>267</sup>

Mengenai dasar negara, lebih dulu Natsir mengingatkan bahwa negara sebagai institusi mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan Undang-Undang Dasar atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Negara juga meliputi seluruh masyarakat dan seluruh lembaga yang terdapat di dalamnya, ia mengikat atau mempersatukan institusi-institusi itu ke dalam suatu peraturan hukum, ia menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, ia mempunyai hak untuk memaksa anggotanya mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan, dan negara juga mempunyai tujuan untuk memimpin, memberi bimbingan, dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

“Kita sudah mempunyai negara,” ujar Natsir, “maka teranglah di dalam menyusun Undang-Undang Dasar bagi negara kita, dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlulah kita bertolak dari pokok pikiran yang pasti, yakni bahwa Undang-Undang Dasar bagi negara kita itu harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di negara kita.” Lebih lanjut Natsir, “Tegasnya, Undang-Undang Dasar negara itu haruslah berurat-berakar dalam kalbu. Yakni berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan, serta

---

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm 91.

falsafah hidup dari rakyat dalam negara kita ini. Dasar negara yang tidak memenuhi syarat demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labil dan tidak duduk atas sendisendi yang kokoh.”<sup>268</sup>

Menurut Natsir, bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, maka Islam dimajukan sebagai dasar negara kita. Akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan bahwa ajaran-ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas dasar saling harga menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara. “Kalaupun besar, tidak akan melanda. Kalaupun tinggi, malah akan melindungi!” tegas Natsir dalam pidatonya.

Suara lantang Natsir di Konstituante segera mengundang tanggapan paling sedikit, dari empat anggota Konstituante, semuanya pendukung gagasan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dari Sutan Takdir Alisjahbana (PSI), Nyoto (PKI), Roeslan Abdulgani, dan Arnold Mononum. Dua terakhir ini dari PNI. Dengan merekalah Natsir terlibat dalam perdebatan panjang mengenai dasar negara. Akhirnya, sesudah beberapa kali dilakukan pemungutan suara baik secara terbuka maupun secara tertutup, ternyata tetap tidak ada yang berhasil meraup dukungan dua pertiga suara; Ketua Konstituante Mr. Wilopo mnengusulkan agar Konstituante melakukan reses dengan

---

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm 95.



ketentuan di reses itu akan dipergunakan oleh Pimpinan Konstituante untuk mengadakan tukar pikiran dengan Pemerintah.<sup>269</sup>

Pertukaran pikiran dilangsungkan pada 27 Juni 1959. Akan tetapi, bayang-bayang jalan buntu mulai terlihat. Pada diskusi itu pemerintah menegaskan bahwa anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan Presiden Sukarno bersama dengan pemerintah. Oleh itu, sukar bagi Pemerintah untuk melangkah lebih lanjut tanpa bermusyawarah dulu dengan Presiden, sebab Presiden sejak 23 April hingga 29 Juni 1959, tidak berada di dalam negeri. Bung Karno sedang melakukan kunjungan ke beberapa negara.

Anwar Harjono, salah seorang tokoh Partai Masyumi mengatakan bahwa persidangan di Konstituante sejatinya tidak akan mengalami *deadlock*, seandainya fraksi-fraksi yang mendukung Pancasila tidak memboikot sidang-sidang Konstituante. Namun begitu, antara Ketua Umum Partai Masyumi Prawoto Mangkusasmito, dengan Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI) sudah berusaha untuk saling melakukan lobi-lobi untuk kompromi. Kesepakatan hampir didapat, jika saja Soekarno menahan diri untuk tidak mengeluarkan Dekrit Presiden tersebut. Partai Masyumi, menurut Anwar Harjono, tak mempersoalkan isi Dekrit tersebut. Apalagi, disebut di dalamnya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan menjadi rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Namun partai berlambang bintang dan bulan itu menyesalkan cara-cara kekuasaan yang diambil Soekarno dalam mengeluarkan Dekrit tersebut, bukan dengan

---

<sup>269</sup> *Ibid.*

jalan musyawarah. “...Sebelum dekrit, sudah terjadi tindakan-tindakan Presiden Soekarno yang inkonstitusional. Sesudah dekrit, tindakan-tindakan inkonstitusional itu lebih leluasa lagi, karena merasa lebih kuat lagi,” ujar Harjono.<sup>270</sup>

Untuk membuka kebuntuan, Prawoto menawarkan solusi kepada kelompok di luar Islam dengan mengatakan, “Kepada penganut-penganut agama lain di luar Islam kami njatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikitpun jika saudara-saudara di dalam rumusan-rumusan itu menginginkan pula djaminan untuk menunaikan sjarī’at agama golongan saudara.”<sup>271</sup> Pada tanggal 5 Juli 1959, akhirnya lahir Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berbunyi: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Akibat Dekrit Presiden itu, Konstituante bubar. “Konstituante bukannya gagal, tapi digagalkan!” tegas Adnan Buyung Nasution,<sup>272</sup> orang yang melakukan penelitian tentang sidang di Majelis Konstituante. Dekrit dinilai sebagai intervensi Soekarno terhadap anggota Konstituante yang dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat secara keseluruhan. Karenanya, ada yang mengatakan Dekrit Presiden ketika itu sebagai *coup*

<sup>270</sup> Lukman Hakiem, dalam Artwijaya, *Op.Cit.*, hlm 91.

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> Adnan Buyung Nasution, dalam Mr. S.M. Amin, 1967, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 76.

*d'etat!* Kudeta oleh orang yang berkuasa terhadap wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilihan umum tahun 1955. Terlepas dari kontroversi di sekitar kelahirannya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ternyata telah mampu mengakomodir gagasan politik yang berkembang di dalam Konstituante. Dari sini, maka harapan Natsir untuk menerapkan gagasannya akhirnya menemui jalan akhir.

Prawoto Mangkusasmito yang menolak tegas upaya Soekarno membubarkan Konstituante dan melanggengkan kekuasaannya atas nama “Demokrasi Terpimpin”, dalam pidato di sidang tersebut pada 4 Mei 1959, mengeritik keras upaya Soekarno tersebut. Prawoto mengatakan, ia dilantik sebagai anggota Konstituante dengan ucapan “Demi Allah”, yang berarti melandaskan pekerjaan dan perjuangan atas nama Tuhan, bukan demi yang lainnya. “Kami mengutjapkan sumpah untuk menjatakan kesanggupan kami akan berusaha sekuat tenaga memadjukan kesejahteraan Republik Indonesia itu dimulai dengan kata-kata “demi Allah” dan tidak dengan kata demi ini atau demi itu. Kami ingin sebagai anggauta Konstituante ini mendjadi penjambung lidah jang setia dari rakjat pemilih kami, rakjat jang kadang-kadang cuma bisa menjampaikan kata hatinja dengan berlinang air mata, rakjat jang pertjaja kepada Tuhan...”<sup>273</sup>

Sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 1958, Partai Masyumi menyatakan, “Apa jang dikatakan sebagai Demokrasi Terpimpin belum djelas bagi Masyumi. Pendirian Masyumi ialah, pimpinan negara didjalankan menurut *qoidah-qoidah* hukum jang

---

<sup>273</sup> *Ibid.*, hlm 73.

dipatuhi juga oleh tiap-tiap penguasa, sesuai dengan preambule dan pasal 1 ayat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara, yang menamakan Republik Indonesia ini suatu Negara Hukum (*rechtsstaat*); pimpinan dari satu kekuasaan yang menempatkan dirinya di atas hukum, permulaan dari pertumbuhan ke arah satu “negara kekuasaan” (*machtsstaat*) tidak dapat diterima. Masyumi memperjuangkan suatu *rechtsstaat* dan menolak suatu *machtsstaat*.”

Melihat gelagat politik dan pernyataan Soekarno yang tidak beres, pada masa-masa itu Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1966, dan menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap rencana Soekarno membubarkan partai-partai. Hatta juga dengan keras menyindir Soekarno yang mulai terpengaruh dengan komunisme dan ingin menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Hatta menyatakan dengan kebijakan seperti itu maka demokrasi akan terkubur. Bahkan pada kemudian, Hatta membuat tulisan rutin di Majalah *Pandji Masyarakat* dengan judul “Demokrasi Kita”.

Mohammad Natsir, yang sejak masa sebelum kemerdekaan menjadi *sparing partner* dalam mengkonter pemikiran-pemikiran sekular Soekarno, kemudian juga angkat bicara. Melihat gejala otoritarian yang nampak mulai mengalir dalam darah Soekarno, Natsir lalu mengeluarkan seruan yang ia tulis dalam bentuk selebaran yang kemudian disebarakan kepada kader-kader Partai Masyumi di berbagai daerah. “Jika partai hendak dikubur, sendi demokrasi hendak dihanturkan, maka Masyumi rela dan bersedia tampil kedepan sebagai pelopor untuk mempertahankan demokrasi, dari

manapun datangja bahaja,” demikian disampaikan Natsir pada pembukaan sidang Konferensi Masyumi Sumatera Tengah di Bukittinggi.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan dua hari setelah Soekarno melontarkan gagasan kontroversialnya, Natsir mengatakan, “Saya rasa, bahwa selama di negeri kita ini sila demokrasi masih dipertahankan sebagai salah satu dasar negara, tentulah partai-partai akan terus ada. Sebaliknya selama masih ada kebebasan untuk berpartai, selama itu ada demokrasi. Dan apabila partai-partai sampai dikubur, demokrasi pun turut masuk ke liangnya sekalian. Dan yang tinggal berdiri di atas kubur itu adalah diktator,” tegas Natsir.<sup>274</sup>

Akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960 menjadi masa-masa genting bagi Partai Masyumi. Rezim Soekarno yang berkuasa mulai menyeleweng dari kekuasaan. Beragam jargon dan istilah, menjadi tameng untuk melanggengkan tahta dan menekuk lawan politiknya. Gagasan Demokrasi Terpimpin seolah menjadi ‘mantra sakti’. Alat penindas oposisi bernama ideologi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) menjadi ‘palu godam’ kekuasaan. Soekarno dengan segala cara mulai menggali kuburan bagi lawan-lawan politiknya. Teriakan-teriakan, “Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu!” menjadi penanda bahwa sosok yang menganggap dirinya sebagai “pemimpin arah demokrasi bangsa” itu sedang menebar teror politik kepada mereka yang tak seiring sejalan dengan pemerintah. Stigma “Kontra Revolusi” menjadi

---

<sup>274</sup> *Ibid.*

alat propaganda yang menggerakkan aparat-aparat pemegang senjata untuk menggiring oposisi mendekam di dalam bui.

Awal tahun 1960-an, pertentangan di lapangan antara Masyumi dengan Soekarno makin meruncing. Penolakan terhadap “Konsepsi Presiden” dan ide “Demokrasi Terpimpin”, yang menurut para aktivis Masyumi tak lebih dari upaya Soekarno melanggengkan kekuasaan dan menjalin hubungan dengan Komunis, terus disuarakan. Buya Hamka, tokoh partai Masyumi dalam khutbah-khutbahnya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Islam dalam keadaan bahaya. Bahaya yang dimaksud menurut Hamka adalah geliat komunisme dan kristenisasi yang sedang menggurita di lingkaran elit kekuasaan. Ceramah-ceramah Buya Hamka tentu saja membuat Soekarno geram. Dalam sebuah sambutan ketika mengadakan perayaan Nabi Muhammad di Istana Negara, Soekarno mengatakan “Ada orang yang mengatakan Islam dalam bahaya. Orang yang berkata sendiri itulah yang sekarang dalam bahaya!”<sup>275</sup> Pernyataan Soekarno belakangan terbukti. Dengan tuduhan ikut dalam rapat gelap untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno, Hamka kemudian dijebloskan ke penjara. Tak hanya Hamka, Mohammad Natsir dan para aktivis Masyumi lainnya juga ikut dicituk dan digelandang ke bui.

Natsir, Hamka dan para tokoh Masyumi lainnya dengan tegas menolak proyek Nasakomisasi pemerintah Soekarno, dan mengeritik keras upaya tokoh berjuluk “Bapak Proklamator” tersebut yang menggandeng Partai Komunis Indonesia (PKI)

---

<sup>275</sup> *Ibid.*

untuk terlibat dalam pemerintahan. Menurut Buya Hamka, Nasakom Jiwaku artinya dalam jiwa kita sendiri mesti bersatu antara Nasionalisme Indonesia dengan Internasionalisme Komunis. Agama dijadikan sekadar percaya saja, tidak dipraktikkan secara lengkap dan utuh. Akibatnya, Naskom memberi ruang bagi komunis untuk beraksi dan menempuh cara-cara merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ujungnya, kata Buya Hamka, peristiwa pembantaian di Lubang Buaya yang dilakukan komunis. “Inilah akibat dari penyelewengan Pancasila atau munafik Pancasila itu; yang dipidatokaan buat dikhianati. Atau di dalam jiwa sendiri tidak ada, sebab itu menjadi kosong setelah dihembuskan ke tengah udara bebas,” kata Hamka.

Pengamat politik dan militer, Herbert Feith, mencatat pada akhir tahun 1960 setelah Soekarno membubarkan Masyumi, Sampai pada tahun 1962, hasrat Soekarno untuk memasukan PKI dalam kabinet semakin menggebu. Pada masa ini juga Soekarno mengeluarkan gagasan tentang Nasakom untuk memasukan unsur PKI dalam kabinet dan memberikan posisi kepada tokoh PKI Dipa Nusantara (DN) Aidit dan M.H Lukman untuk duduk dalam pemerintahan. Sikap Soekarno ini mendapat tentangan keras dari Angkatan Darat yang memang sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang bahaya komunisme. Inilah babak akhir dari sebuah pertarungan politik yang sebelumnya berjalan dalam suasana perdebatan ide-ide. Suasana saling mengajukan gagasan untuk masa depan. Pada era ini, zaman berdebat berganti dengan aksi saling

menyikat. Mereka yang teriak bahwa negara harus *zonder* phobi-phobian, dan *zonder* dari sikap komunisto-phobia, justru phobi terhadap lawan-lawan politiknya.<sup>276</sup>

#### **V.5. Transformasi Pemikiran Intelektual: Dari PRRI, Petisi 50 hingga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia**

Rezim Orde Lama memenjarakan Natsir dan kawan-kawannya karena dianggap “melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Meskipun kemudian hal ini dibantah oleh Mestika Zed (2011), menurutnya, entah PRRI itu pemberontakan atau bukan, tergantung pada pengertian dan titik pandang yang digunakan. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, tidak ada maksud PRRI untuk mendirikan negara dalam negara, dan juga tidak ada tuntutan untuk menggulingkan pemerintah, kecuali mengajukan pemerintahan tandingan karena pemerintahan di Jakarta dianggap sudah inkonstitusional.<sup>277</sup>

Menurut Mestika Zed, dalam satu dan lain hal PRRI adalah reformasi *avant le latere*, reformasi kelewat dini, karena klaim PRRI terhadap pusat ternyata dibenarkan oleh sejarah yang lebih kemudian, ketika pembubaran PKI baru terlaksana pada masa Orde Baru, dan tuntutan otonomi luas pada masa reformasi. “Betapapun hasilnya masih mengecewakan, keduanya adalah gagasan yang sudah dicetuskan secara lantang oleh daerah bergolak tahun 1950-an,” simpul Mestika Zed. “Orang-orang seperti Sjafruddin

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> Mestika Zed, dalam Lukman Hakiem, *Op.Cit.*, hlm 462.



Prawiranegara, M. Natsir, Boerhanoeddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, Ahmad Hussein, M. Simbolon, Alex Kawilarang, Ventje Sumual, dan lain-lain bukan pengkhianat. Orang-orang ini, orang-orang yang sangat besar jasanya kepada Republik ini, bahkan berhak dan pantas diberi gelar pahlawan”, tutupnya.<sup>278</sup>

Natsir juga bagai tidak peduli dengan penilaian terhadap PRRI. Menurutnya, “Sebutlah gerakan itu pemberontakan karena kami melepaskan diri dari pemerintah, tapi itu bukan untuk kepentingan sendiri. Kami ingin kembali ke Undang-Undang Dasar. Kita tunduk sama-sama. Apa itu pemberontak namanya?” Dewan Perjuangan dalam tuntutananya, yang juga diulang oleh Perdana Menteri PRRI, Sjafruddin Prawiranegara, menegaskan kalau pemerintah di Jakarta mau kembali ke Undang-Undang Dasar yang dilanggar itu, “Kami bersama-sama akan menyerahkan kembali semuanya kepada pemerintah. Sebab, kita memerlukan suatu budaya taat kepada konstitusi. Sukarno sudah melanggar, dan komunis malah terus memasukkan faham mereka, sehingga memperoleh kekuasaan,” kata Natsir.<sup>279</sup>

PRRI menurut Prof. Salim Said (2011) haruslah dilihat sebagai usaha menyelamatkan Republik Indonesia yang terancam komunisme. PRRI bukanlah gerakan separatis, melainkan gerakan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia yang terancam oleh komunisme dan “petualangan” politik Presiden Sukarno. PRRI kalah, dan selanjutnya diperlukan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya ancaman PKI serta

---

<sup>278</sup> *Ibid*, hlm 463.

<sup>279</sup> *Ibid*, hlm 462.

“petualangan” politik Presiden Sukarno hancur lewat Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965.<sup>280</sup>

Sebelumnya juga Mohammad Natsir mengalami dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur. Sukarno juga memberaikan satu persatu rekan pergerakan Natsir: Hamka dipenjara, Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama. Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Sukarno tenggelam. Natsir sempat mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Kemudian hari, ternyata itu janji kosong belaka.

Mohammad Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah Pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Orde Baru datang seolah membawa janji dan harapan. M. Natsir dan kawan-kawan yang baru dibebaskan dari penjara rezim Sukarno, termasuk yang menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Oleh karena itu, tokoh seperti Prawoto Mangkusasmito optimistik di awal Orde Baru yang disebut sebagai masa rehabilitasi multikompleks, Partai Masyumi akan turut direhabilitasi. Sedari awal, tampaknya Natsir sudah

---

<sup>280</sup> *Ibid.*

menyadari kemungkinan tertutupnya lapangan politik bagi dirinya dan kawan-kawan. Jika itu terjadi, Natsir mengingatkan, “Jangan terus bertopang dagu atau menggerutu di pinggir jalan. Tetapi harus terjun ke dalam bidang nonpolitik, bidang pembinaan umat lahir dan batin.”<sup>281</sup>

Apa yang diprediksikan Natsir ternyata benar, Soeharto menolak rehabilitasi Masyumi. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil. Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>282</sup>

Meskipun geraknya dibatasi, namun Natsir tetap banyak membantu rezim Soeharto. Misalnya, pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha

---

<sup>281</sup> Lukman Hakiem, *Op.Cit.*, hlm 101.

<sup>282</sup> *Ibid.*

itu agar tak mengabaikan Indonesia. Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi. Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, “Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.”<sup>283</sup> Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.

Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan rezim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Natsir pun seringkali bersikap kritis kepada rezim saat itu. Sikap kritis dan korektif pada masa itu membuat hubungan dengan pemerintahan Orde Baru kurang mesra. Kritik yang tajam dan menyengat yang sering dilayangkan ke pemerintah menjadi aktifitas rutin. Keberanian mengoreksi pemerintahan Orde Baru dan ikut menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980 menyebabkan ia dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan RI. Pencekalan ini berlangsung hingga wafatnya.<sup>284</sup>

---

<sup>283</sup> *Ibid.*, hlm 102.

<sup>284</sup> *Ibid.*, hlm 103.

Ketika itu, Natsir risau dengan pidato Presiden Soekarno. Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Presiden Soeharto tanpa teks di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Soeharto berbicara tentang asas tunggal Pancasila yang, menurut dia, di masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik. Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.<sup>285</sup>

Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: “Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya sebagai otokrat: “Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.” Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan juga gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung Granadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia

---

<sup>285</sup> Seri Buku TEMPO, *Op.Cit*, hlm 117-123.

pegawai kantor pemerintah daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.<sup>286</sup>

Pada pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu ditanya soal isi pidatonya. A.M. Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir “Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah Slamet Bratanata, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru. Pucuk dicita ulam pun tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan itu ke Senayan, 13 Mei 1980.<sup>287</sup>

Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke Dewan tanggal 1 Juni. Sudomo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional. Dari Sudomo jugalah nama “Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution

---

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> *Ibid.*

dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.<sup>288</sup>

Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi. Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Sukarno soal gagasan Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan Sudomo. Natsir hanya berujar, “Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”<sup>289</sup>

Namun, Natsir tak patah arang. Mati satu tumbuh seribu. Satu jalur tertutup, maka jalur yang lain akan ia buka. “Kalau dulu kita berdakwah melalui jalur politik, maka kini saatnya, kita berpolitik melalui jalur dakwah.”, ujarnya. Natsir pun keluar dari jalur politik. Akhirnya, bersama para alim ulama lainnya, yayasan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) resmi dibentuk. Ia memulai aktifitas perjuangannya dengan menggunakan format dakwah, bukan format politik.

Melalui Dewan Dakwah, Natsir menerapkan enam strategi dakwah. *Pertama*, memperluas pengertian dakwah dari “tabligh” kepada pengertian yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai kelanjutan risalah Nabi Muhammad. Dewan Dakwah mengingatkan umat Islam bahwa pengertian dakwah mencakup

---

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*

seluruh aspek kehidupan. *Kedua*, mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada satu program yang lengkap, program yang meliputi seluruh aspek kehidupan, maka markas penggerak umat itu ialah masjid. *Ketiga*, Dewan Dakwah memberi pengertian kepada jamaah bahwa tugas dakwah adalah *fardhu 'ain* (wajib) bagi setiap muslim. Pesan Nabi, “Sampaikan dariku, walaupun satu ayat.” Hadits ini memberi pengertian, tiap-tiap umat Islam mempunyai kewajiban menyebarkan dakwah sesuai dengan kesanggupannya. *Keempat*, menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah. *Kelima*, meningkatkan usaha pembentengan/pembelaan akidah. *Keenam*, membangkitkan ukhuwah Islamiyah internasional.

Natsir melihat ada tiga fondasi kekuatan ummat Islam dan itu selamanya harus dijaga dan dikembangkan. *Pertama*, dunia pesantren, *kedua*, masjid, dan *ketiga*, kampus. Ketiga fondasi dalam konsepsi Natsir tidak boleh berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya sebuah jaringan yang integral satu sama lain. Karena itu, Natsir melalui Dewan Dakwah mendirikan Pesantren yang berdekatan dengan Kampus diantaranya Pesantren Darul Fallah di Bogor yang tak jauh dari Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pesantren Ulil albab yang ada dalam lingkungan Kampus Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor yang dibina oleh Ustadz Dr. Didin Hafidhuddin.<sup>290</sup>

Pada tahun 1968 M. Natsir beserta kawan-kawanya membina generasi muda kampus (khususnya dosen, baik dalam bidang agama maupun bukan) sebanyak 40 orang

<sup>290</sup> Hadi Nur Ramadhan, 2019, *Natsir dan Gerakan Dakwah Kampus*, (Jakarta: Tamadun), hlm 6-8.



yang berasal dari kampus ITB, UNPAD, IKIP Bandung, UGM Yogyakarta, UNAIR Surabaya, IPB Bogor dan lain-lain. Saat itu KH. EZ. Muttaqien bertindak sebagai project officernya dan Imaduddin Abdurrahim (biasa dipanggil Bang Imad) asisten utamanya. Acara pengkaderan ini langsung ditangani M. Natsir, Prof. Osman Raliby, Prof. HM. Rasjidi, Zainal Abidin Ahmad, Prawoto Mangkusasmito, dan beberapa tokoh lainnya. Sekembali dari acara training, segera mereka ke kampus masing-masing, mereka mengemangkan pemikiran keislaman seperti apa yang mereka terima dalam acara kaderisasi.<sup>291</sup>

Perhatian Natsir pada generasi muda khususnya mahasiswa, tak hanya diberikan untuk pendidikan dalam negeri. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih handal Natsir juga mengeluarkan rekomendasi pada sejumlah mahasiswa untuk belajar di luar negeri khususnya di Timur Tengah . Karena itu, hubungan baik dan nama baik M. Natsir dengan kalangan pemikir Islam di Timur Tengah terjadi sudah sejak lama di gunakan untuk meningkatkan SDM. Hubungan baik ini dilanjutkan Natsir ketika sudah mendirikan Dewan Dakwah yaitu dengan mengirim sejumlah mahasiswa ke luar negeri.

Para Alumni Timur Tengah yang dikirim Pak Natsir seperti Abu Ridha maupun yang mempunyai afiliasi pemikiran yang sama dengan M. Natsir seperti A. Rahman Zaenuddin menterjemahkan buku-buku Al-Ikhwan Al-Muslimun dan Jama'at Islami ke dalam Bahasa Indonesia. Yang menjadi alasan mengapa buku-buku kalangan

---

<sup>291</sup> *Ibid.*

Ikhwan dan Jama'at Islami diterjemahkan karena gerak langkah tokoh-tokoh Dewan Dakwah saat itu sangat amat terbatas dan selalu dicurigai. Karena itu, Natsir meminta pada para kader muda untuk menterjemahkan buku-buku yang ditulis tokoh-tokoh pergerakan Timur Tengah. Diantaranya buku Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al- Banna yang ditulis Yusuf Al-Qardhawy diterjemahkan oleh Nabhan Husein tahun 1983, Ma'alim Fi Al-Thariq karangan Sayyid Quthub diterjemahkan oleh A. Rahman Zainudin pada tahun 1980. Buku-buku ini diterbitkan Media Dakwah, lembaga penerbitan Dewan Dakwah. Peranan Dewan Dakwah dalam menerbitkan buku-buku yang ditulis kalangan Al-Ikhwan Al-Muslimun dan Jama'at Islami merupakan catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan.<sup>292</sup> Dan melalui para kader inilah, akhirnya muncul gerakan dakwah kampus dan berkembangnya pemikiran Ikhwanul Muslimin di Indonesia.

Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas riwayat sosio-biografis pemikiran Mohammad Natsir:

*Tabel 3 Sosio-biografi Mohammad Natsir*

<i>Gagasan</i>	<i>Tekanan</i>	<i>Dorongan</i>	<i>Aktor/ide dominan</i>	<i>Transformasi (Mobilisasi)</i>	<i>Konteks</i>
Pengetahuan Islam awal	Kecil	Besar	- Keluarga  - Lembaga Pendidikan	- Menjadi kaum terpelajar  - Menjadi aktivis	- Masa Kolonial hingga Kemerdekaan

<sup>292</sup> *Ibid.*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jong Islamiyeten Bond</li> <li>- A. Hassan</li> </ul>	pergerakan awal	
Ide-ide modernisme Islam	Besar	Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Abduh &amp; Rasyid Ridha</li> <li>- A. Hassan &amp; Persis</li> <li>- H. Agus Salim</li> <li>- Ahmad Surkati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi intelektual modernis Islam</li> <li>- Tokoh politik Masyumi</li> </ul>	-Masa revolusi hingga Orde Lama
Mosi Integral	Kecil	Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyumi</li> <li>- Sukarno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Fraksi Masyumi</li> <li>- Menteri penerangan 3 periode</li> <li>- Perdana Menteri Pertama</li> </ul>	Orde Lama
Islam sebagai Dasar Negara	Besar	Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyumi</li> <li>- Tokoh partai Islam lainnya</li> <li>- Muhammad Abduh &amp; Rasyid Ridha</li> <li>- Ikhwanul Muslimin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua partai Masyumi</li> <li>- Awal transformasi peran</li> </ul>	Orde Lama - Orde Baru
Transformasi dakwah	Besar	Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Dakwah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intelektual muslim lintas-nasional</li> </ul>	Orde Baru

			- MAI - Tokoh-tokoh Islam Transnasional	- Bapak bangsa - Penggagas 3 pilar kebangkitan umat: Masjid, Kampus, Pesantren
--	--	--	--	--

Di mata internasional, Mohammad Natsir dikenal sebagai pendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di Asia dan Afrika untuk selanjutnya menghimpun negara-negara tersebut dalam ikatan kerja sama negara-negara yang baru merdeka. Sebagai seorang tokoh pemimpin politik, Natsir kerap diminta nasehat dan pandangannya, bukan saja oleh tokoh-tokoh Palestina Liberation Organisation (PLO), Mujahid Afganistan, Moro Bosnia, dan lainnya dan tokoh-tokoh politik di dunia non Muslim seperti Jepang dan Thailand.

Semenjak tahun 1967, Natsir diminta menjadi Wakil Presiden Majelis Alam Islami (MAI/Kongres Islam Sedunia) yang berpusat di Karachi, Pakistan. Ketua Muktamar ini adalah bekas Mufti Palestina, Mohammad Al-Husaini, seorang pejuang Palestina. Dalam kedudukan sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islami atau sebagai anggota Majelis Ta'sisi itulah, Natsir kerap berkunjung ke luar negeri, baik untuk berbicara di suatu seminar, maupun untuk meninjau suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Dalam satu kesempatan, Natsir pernah berkunjung ke tempat pengungsi Palestina. Natsir juga sempat meninjau tempat pelatihan para gerilyawan Palestina di dalam satu lembah.

#### **V.6. Relevansi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Konteks Perkembangan Sosial dan Politik Indonesia Saat Ini**

Konsep Islam sebagai dasar Negara yang diusung oleh Mohammad Natsir sejak sidang kontituante yang membahas tentang dasar negara, sebenarnya konsep tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang didasari dengan sumber dari Allah yaitu Alquran. Di dalam Alquran menerangkan semua perkara yang ada dunia ini, baik itu dalam politik, kenegaraan, social, pendidikan, kehidupan antar manusia dengan manusia bahkan manusia dengan Allah. Dengan hal tersebut bahwa Islam merupakan agama yang Universal (yang menyangkup semua aspek kehidupan manusia).<sup>293</sup>

Natsir menyatakan Islam adalah satu agama yang hidup dalam sebagian besar rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Islam mengandung dua unsur, yaitu unsur hubungan manusia dengan Tuhanya (ibadah) dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk (muamalah). Unsur hubungan manusia dan sesama makhluk (muamalah), meliputi kehidupan secara perorangan, kehidupan secara kekeluargaan dan kehidupan secara kenegaraan. Untuk menghadapi soal undang-undang dasar

---

<sup>293</sup> M. Natsir, 2001, Op.Cit., hlm 88.

negara dengan sendirinya secara otomatis akan berhadapan dengan ajaran-ajaran Islam yang tersimpan di dalam unsur yang kedua, yaitu *muamalah*.<sup>294</sup>

Gagasan negara berdasarkan ajaran Islam berangkat dari kepercayaan bahwa Islam adalah agama yang “lengkap dan sempurna”. Yang dimaksud “lengkap dan sempurna” di sini adalah ajaran Islam yang memuat peraturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pribadi hingga publik. Ajaran Islam dianggap fleksibel, yang berarti mereka abadi dan selalu relevan dalam situasi sosial apa pun, setidaknya menurut para pendukung fanatik Negara Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang “lengkap dan sempurna” menuntut umat Islam di mana-mana untuk menerapkan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan.<sup>295</sup>

Mohammad Natsir sebagai tokoh Muslim Indonesia yang memprakarsai negara berbasis Islam berpendapat bahwa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harus menerima Islam sebagai dasar hukum kehidupan negara. Natsir memahami bahwa jika seseorang mengaku sebagai seorang Muslim, ia harus memiliki keyakinan yang kuat dalam hal-hal berikut:

1. Percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai hidup;
2. Percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasul-Nya;

---

<sup>294</sup> *Ibid.*

<sup>295</sup> Irsandy Maulida, 2015, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir mengenai Dasar Negara Islam*, (Tasikmalaya: FISIP Universitas Siliwangi), hlm 1-18.

3. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia atau perseorangan;
4. Percaya hubungan tersebut dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari;
5. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, kehidupan roh-nya tidak berakhir;
6. Percaya dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
7. Percaya dengan keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup manusia.<sup>296</sup>

Tujuh poin yang disebutkan di atas harus dimiliki oleh setiap Muslim untuk dapat mencapai kehidupan dunia yang berkualitas untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan menegakkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan negara dan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas sosial dan negara seorang Muslim harus benar-benar ditujukan pada pengabdian kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, Mohammad Natsir mengungkapkan bahwa tujuan hidup umat Islam setidaknya adalah tiga hal, yaitu (1) mengupayakan kemerdekaan untuk Islam dalam rangka menerapkan struktur dan peraturan Islam (2) untuk kepentingan dan prioritas umat Islam pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Sesuai dengan makna kata Islam menurut Alquran yang berarti kesediaan seseorang untuk melaksanakan perintah Tuhan dan mengikut Dia, diartikan oleh Natsir sebagai penyerahan penuh pada ketentuan hukum Tuhan. Kenikmatan Tuhan hanya bisa dicapai jika kita menerapkan dan mematuhi aturan yang telah digariskan oleh Tuhan.

---

<sup>296</sup> *Ibid.*

Karena itu, penerapan ajaran Islam sebagai dasar negara adalah hal mutlak yang harus diterima dan dilaksanakan oleh setiap Muslim.<sup>297</sup>

Konsep negara Islam menurut Mohammad Natsir berbeda dengan negara Islam yang diterapkan oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Mohammad Natsir adalah pengikut demokrasi, ia percaya bahwa demokrasi adalah cara hukum untuk menentukan arah kebijakan negara. Seperti tokoh-tokoh lain yang memberi istilah pada konsep yang ia rumuskan, Mohammad Natsir menamai konsep demokrasi yang ia ciptakan dengan nama “teistik demokrasi”. Istilah ini mengacu pada bentuk pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dengan demikian, Islam sebagai dasar hukum menjadi denyut nadi bagi komunitas Muslim Indonesia untuk membawa kehidupan yang baik bagi negara.<sup>298</sup>

Dari penjelasan Mohammad Natsir di atas, kita dapat melihat perbedaan antara gagasan Mohammad Natsir tentang demokrasi dan demokrasi Barat. Demokrasi yang diprakarsai oleh Mohammad Natsir berdasarkan ajaran Islam berbeda dengan demokrasi barat yang cenderung sekuler. Mohammad Natsir menganggap bahwa legislatif bukanlah segalanya dalam pemerintahan. Dia bukan satu-satunya yang memiliki supremasi tertinggi seperti yang dipegang oleh demokrasi barat. Dalam legislatif, dibahas cara-cara untuk melaksanakan semua hukum, atau implementasi teknis di mana hukum itu sendiri telah ditetapkan sebagaimana digariskan oleh Allah.

---

<sup>297</sup> *Ibid.*

<sup>298</sup> *Ibid.*



Mengenai sumber kekuasaan, kekuasaan diperoleh atas pemilihan dan kemauan rakyat. Kekuasaan digunakan untuk menegakkan hak dan menegakkan keadilan bagi semua orang. Hukum Allah ditegakkan di bumi, perdamaian akan datang untuk semua umat manusia. Konsep ideal negara Islam tidak dapat dinegosiasikan oleh Muslim Indonesia pada khususnya. Untuk mencapai keridhaan Allah, satu-satunya cara adalah dengan menjalankan syari'ah yang telah ia uraikan.<sup>299</sup>

Pandangan Mohammad Natsir tentang negara Islam memang sangat ideal, tetapi hal-hal yang dianggap baik dan relevan dengan situasi politik saat ini juga dapat diambil. Sebagai negara yang dikatakan menerapkan demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik, Indonesia cenderung mengalami disintegrasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kebebasan yang merupakan ciri utama demokrasi saat ini hanya dinikmati oleh mayoritas, sedangkan minoritas harus minggir sebagai penonton. Ini disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai nasional dan telah digantikan oleh nilai-nilai demokrasi barat yang cenderung “dipaksakan”.

Salah satu nilai terpenting yang mulai menghilang adalah musyawarah. Dalam perkembangannya, musyawarah telah digantikan oleh pemungutan suara dalam memecahkan masalah. Dalam pemungutan suara, suara mayoritas akan secara otomatis menang dan minoritas akan dihilangkan akan mengalami "marginalisasi". Suara mayoritas dianggap sebagai pembenaran yang harus disepakati oleh minoritas. Ini

---

<sup>299</sup> *Ibid.*

adalah salah satu kebobrokan demokrasi barat yang tidak relevan dengan nilai-nilai rakyat Indonesia.<sup>300</sup>

Begitu juga mengenai Konsep Negara Mohammad Natsir menjelaskan mengenai Konsep Negara yang menurutnya merupakan suatu “*institution*” yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Maka negara sebagai satu institutions menurut Mohammad Natsir harus mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan undang-undang dasar, atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Negara harus berdasarkan kalbu masyarakat atau tertanam kuat dalam benak setiap warga Negara. Menurut Mohammad Natsir, dasar Negara harus berupa sesuatu yang hidup dan dapat dimengerti oleh masyarakat dalam menjalankan dan menyusun kehidupannya.<sup>301</sup>

Berbicara tentang relevansi konsep Negara Islam Mohammad Natsir dengan situasi sosial-politik saat ini di Indonesia dapat digunakan sebagai solusi untuk keluar dari masalah yang sedang melanda bangsa. Gagasan Mohammad Natsir tentang negara Islam sebagai dasar negara pada dasarnya mengeksplorasi nilai-nilai atau sikap masyarakat Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Mohammad Natsir mengemukakan nilai-nilai yang harus dimiliki bangsa untuk dapat menciptakan kehidupan politik yang harmoni:

---

<sup>300</sup> *Ibid.*

<sup>301</sup> *Ibid.*

1. Nilai tolong-menolong. Sikap bangsa yang dirasakan terkikis ini harus ditekankan kembali. Dalam Al Qur'an, sikap untuk membantu orang lain diperintahkan. Mohammad Natsir menegaskan bahwa karena pada awal kedatangan Islam adalah untuk menyempurnakan moral manusia, maka untuk menentukan dasar negara haruslah rakyat harus memiliki karakter yang baik dan sempurna.
2. Nilai demokrasi atau musyawarah. Sikap asli rakyat Indonesia selalu berunding. Bagi Mohammad Natsir, musyawarah adalah ketentuan dan perintah Allah yang tertulis dalam Alquran, yaitu dalam ayat yang berbunyi "berkonsultasi dengan Anda dalam hal-hal yang menyangkut diri mereka sendiri". Dalam kehidupan sosial dan negara, Islam memerintahkan untuk selalu berunding dalam menentukan keputusan mengenai urusan publik, pada dasarnya prinsip musyawarah harus dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. Nilai mencintai tanah air. Bagi Mohammad Natsir, cinta untuk tanah air adalah sifat manusia. Rakyat Indonesia telah menunjukkan bahu membahu dengan jihad untuk mengusir penjajah. Menurut Mohammad Natsir, Tuhan menciptakan manusia dengan kebangsaan dan etnis yang berbeda sehingga manusia dapat bersatu. Menurut Mohammad Natsir, ini secara otomatis akan membentuk perasaan cinta bagi ibu pertiwi melalui persatuan perasaan akan nasib dan kesinambungan yang sama.

4. Nilai cinta kemerdekaan. Kemandirian adalah hak setiap orang. Menurut Natsir, ajaran Islam menentang perlakuan sewenang-wenang satu orang terhadap orang lain. Bahkan Islam memungkinkan perang melawan penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, nilai kemerdekaan adalah sifat manusia dalam kehidupannya di dunia.
5. Nilai kesukaan membela yang lemah. Nilai ini terkait dengan nilai tolong bantu. Wajar jika seseorang akan tergerak untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan atau tertindas. Nilai ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan negara. Keharmonisan hidup akan tercapai jika semua orang saling peduli dalam hal yang berbeda.
6. Nilai tidak mementingkan diri sendiri. Di sini Mohammad Natsir mengutip ayat At Taubah ayat 43 yang menjelaskan bahwa hak milik perorangan sepenuhnya diakui oleh Islam dan juga sifat manusia. Namun, kewajiban manusia adalah membagikan apa yang dimilikinya dengan sesamanya yang kurang beruntung. Dalam hal ini Natsir berpendapat bahwa kepentingan kolektif harus di atas kepentingan pribadi untuk menciptakan masyarakat yang makmur.
7. Nilai toleransi antar umat beragama, di dalam Islam tidak mengenal paksaan dalam beragama, pemikiran Mohammad Natsir tersebut melalui Al-Quran surat Al- Baqarah ayat: 256, yang isinya setiap orang mencari keikhlasan. Dalam hal ini Islam mengajarkan Toleransi dan kebebasan

beragama kepada para penganutnya untuk berusaha mempertaruhkan jiwa dan raga mereka.<sup>302</sup>

Konsep negara Islam Mohammad Natsir berisi nilai-nilai yang relevan untuk diterapkan dalam situasi politik saat ini. Beberapa ide yang dipicu oleh Mohammad Natsir bisa menjadi solusi untuk masalah rumit yang dialami bangsa ini. Krisis identitas nasional dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan Mohammad Natsir tentang teisme demokrasi universal. Karenanya, ide Mohammad Natsir relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

#### **V.7. Kritik Terhadap Mohammad Natsir**

Kepemimpinan intelektual Natsir ternyata tak selamanya mulus tanpa hambatan. Pada awal karir sebagai perdana menteri, keberhasilan Natsir menyusun kabinet, ternyata tidak sunyi dari kritik. Kritik itu terutama karena “keberanian Natsir meninggalkan PNI.” Seperti ditulis oleh Deliar Noer,<sup>303</sup> kritik pertama dihubungkan dengan keputusan Muktamar Masyumi, Desember 1949 yang melarang ketua partai menjadi menteri. Keputusan Muktamar itu, tentu berlaku juga untuk Natsir. Menjadi menteri partai saja tidak boleh, apalagi menjadi perdana menteri. Maksud keputusan Muktamar ini agar ketua partai benar-benar mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengkonsolidasikan partai. Akan tetapi, melihat perkembangan keadaan, antara lain

---

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> Deliar Noer, 2000, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Mizan), hlm 205-207.

kemungkinan struktur negara federal tidak dapat dipertahankan lagi, Konferensi Dewan Partai di Bogor pada 3-6 Juni 1950 yang dihadiri oleh wakil dari daerah-daerah, telah mengubah keputusan Muktamar menjadi: “Bila diperlukan, kita akan mengambil kepemimpinan pemerintahan di tangan kita.” Rumusan itupun berlaku untuk ketua partai, sehingga “kalau perlu, ketua partai bisa menjadi menteri.” Selain itu, Konferensi menghendaki agar kursi- kursi perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dipegang oleh Masyumi. Konferensi juga menetapkan, jika ketua partai terpilih menjadi menteri, dia harus nonaktif dan menyerahkan jabatannya kepada orang lain.

Ketua Masyumi (1945-1949) yang dalam kepemimpinan hasil Muktamar 1949 menjadi Presiden Partai, Soekiman Wirjosandjojo berkomentar bahwa Kabinet Natsir merupakan *zaken* kabinet (kabinet ahli), dan bukan kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai seperti dikehendaki oleh Presiden Sukarno, sesuai dengan keinginan rakyat. Soekiman menyesalkan, sifat koalisi tidak dipertahankan. Menurutnya, prosedur pembentukan kabinet dan hasilnya tidak memuaskan.

Anggota Pimpinan Pusat Masyumi, Jusuf Wibisono, membeberkan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh pimpinan Masyumi, dan melancarkan serangan secara terbuka terhadap *beleid* (kebijakan) ketua partai di harian *Mimbar Indonesia* dan kantor berita *Antara*. Wibisono menuduh Natsir terlalu banyak memasukkan keluarganya ke dalam kabinet. Yang dimaksud Wibisono ialah Menteri Dalam Negeri Assaat, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Djohan, dan Menteri Pertahanan

Abdul Halim. Ketiga menteri itu memang tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau, satu daerah dengan Natsir. Serangan terbuka Wibisono kepada Natsir merupakan suatu berita politik besar waktu itu dan disiarkan secara luas di dalam dan di luar negeri oleh kantor-kantor berita asing.<sup>304</sup>

Memenuhi ketentuan partai, sesudah semakin pasti akan menjadi perdana menteri, Natsir melepaskan jabatannya sebagai ketua partai dan menyerahkannya kepada Jusuf Wibisono, orang yang mengkritik dan menyerang secara terbuka kebijakannya dalam menyusun kabinet. Selama Natsir menjadi perdana menteri, Masyumi dipimpin oleh Pejabat Ketua Jusuf Wibisono. Sedangkan jabatan Ketua Fraksi Masyumi di DPR diserahkan kepada Soekiman. Dengan segala dinamikanya, setelah melakukan 16 kali rapat dengan DPR selama 1 bulan 4 hari, Kabinet Natsir akhirnya mendapat kepercayaan dari parlemen dengan 118 setuju “memberikan kepercayaan kepada Kabinet”, dan 73 tidak setuju. Masyumi menerima program Kabinet Natsir, “hanya karena keadaan negara sekarang,” kata Ketua Fraksi, Soekiman.

Dalam pemungutan suara tanggal 25 Oktober 1950, Jusuf Wibisono, dan Boerhanoeddin Harahap (1917-1987) meninggalkan ruang sidang (*walkout*). Kelak, ketika Wakil Presiden Hatta menunjuk Boerhanoeddin menjadi formatur kabinet, sebagai ketua partai, Natsir memberi sokongan penuh.

---

<sup>304</sup> Adam Malik, dalam Lukan Hakiem, *Op.Cit.*, hlm 246.